



**NEGOSIASI IDENTITAS MASYARAKAT LOKALISASI TEGALREJO  
DESA JATIJJAR KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 1977-2009**

**Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:  
Haris Widyantoro  
NIM 13030112130090**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Haris Widyantoro, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 22 Agustus 2019  
Penulis,

Haris Widyantoro  
13030112130090

## **PERSEMBAHAN**

Dipersembahkan untuk:

Ibu dan Ayah

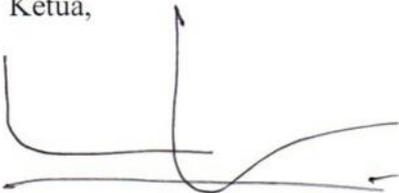
Disetujui,  
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahendra Pudji Utama', followed by a horizontal line.

Mahendra Pudji Utama, S.S., M. Hum.  
NIP 1971002241999031001

Skripsi dengan judul “Negosiasi Identitas Masyarakat Lokalisasi Tegalrejo Desa Jatijajar Kabupaten Semarang Tahun 1977-2009” yang disusun oleh Haris Widyantoro (13030112130090) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Kamis, 29 Agustus 2019.

Ketua,



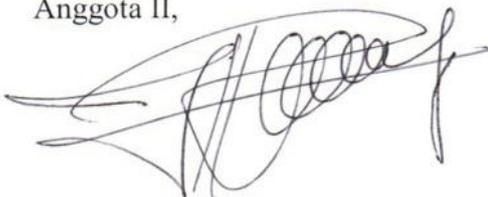
Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum.  
NIP 196808291994031001

Anggota I,



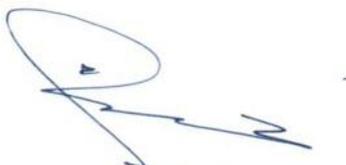
Mahendra Pudji Utama, S.S., M. Hum.  
NIP 197102241999031001

Anggota II,



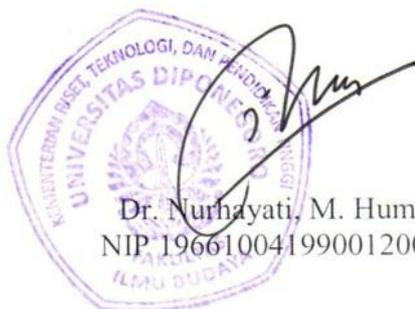
Dr. Haryono Rinardi, M. Hum.  
NIP 196703111993031004

Anggota III,



Rabith Jihan Amaruli, S.S., M. Hum.  
NIP 197211191998021002

Mengesahkan,  
Dekan



Dr. Nurhayati, M. Hum.  
NIP 196610041990012001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak. Penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia untuk memberikan dukungan, baik berupa dukungan moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada,

1. Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Sejarah
2. Mahendra Pudji Utama, S.S., M. Hum selaku pembimbing akademik.
3. Dosen-dosen Ilmu Sejarah yang telah bersedia dengan tulus dan ikhlas membagi banyak ilmu dan pengetahuan.
4. Keluarga besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, terimakasih atas bantuan dan dorongan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, 22 Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	iii	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v	
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi	
<b>DAFTAR ISI</b>	vii	
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	ix	
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	x	
<b>DAFTAR TABEL</b>	xi	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xii	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xiii	
<b>ABSTRAK</b>	xiv	
<b>ABSTRACT</b>	xv	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
	B. Ruang Lingkup	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Tinjauan Pustaka	8
	E. Kerangka Pemikiran	18
	F. Metode Penelitian	23
	G. Sistematika Penulisan	25
<b>BAB II</b>	<b>KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA JATIJAJAR</b>	27
	A. Letak dan Kondisi Geografis	27
	B. Demografi Desa Jatijajar	29
	C. Sosial Budaya dan Kepercayaan	30
	D. Pendidikan	34
<b>BAB III</b>	<b>PERKEMBANGAN DAN STRUKTUR SOSIAL LOKALISASI TEGALREJO</b>	36
	A. Sopir Truk dan Perempuan-Perempuannya	36
	B. Pembubaran Lokalisasi Kandang Kebo dan Perpindahan ke Tegalrejo	40
	C. Dispenda dan PT Miliono Kerto	42
	D. Struktur Sosial Lokalisasi Tegalrejo	51
	1. Kelompok Pemimpin Administratif	52
	2. Kelompok Pengelola Lokalisasi	55
	3. Kelompok Pekerja Prostitusi	58

	a. PSK atau Anak Asuh	59
	b. Muncikari atau Ibu Asuh	66
<b>BAB IV</b>	<b>PROSES FORMASI IDENTITAS MASYARAKAT LOKALISASI TEGALREJO</b>	68
	A. Nama Wilayah Sebagai Representasi Identitas	69
	B. Negosiasi Identitas Melalui Simbol Agama	71
	C. Pekerjaan dan Pernikahan	77
	D. Afiriasi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat	82
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN</b>	89
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	91
	<b>DAFTAR INFORMAN</b>	94
	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	96

## DAFTAR SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
Dispenda	: Dinas Pendapatan Daerah
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IIRC	: Indonesia International Worcamp
IMS	: Infeksi Menular Seksual
IVA	: Inspeksi Visual Asam
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: <i>NonGovernment Organization</i>
Orba	: Orde Baru
PKBI	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas

## DAFTAR ISTILAH\*

<i>afirmasi</i>	: penegasan terhadap diri sendiri terkait hal-hal yang positif
<i>assisting</i>	: menemani atau membantu anak-anak
<i>anak asuh</i>	: PSK yang tinggal dengan muncikari
<i>bilateral camp</i>	: kerjasama dua negara dalam kerelawanan
<i>camp site</i>	: tempat kegiatan relawan
<i>host family</i>	: tuan rumah
<i>identitas</i>	: jatidiri yang melekat pada kelompok tertentu
<i>ibu asuh</i>	: muncikari yang menyediakan tempat tinggal untuk para PSK
<i>international camp</i>	: kegiatan kerelawanan yang diikuti banyak negara
<i>lokalisasi</i>	: kompleks pelacuran
<i>negosiasi</i>	: proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan bersama
<i>prostitusi</i>	: pertukaran hubungan seksual dengan uang
<i>volunteer</i>	: relawan
<i>workcamp</i>	: kegiatan kerelawanan

---

\*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasarkan pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

## DAFTAR TABEL

2.1	Penggunaan Lahan Desa Jatijajar	27
2.2	Jenis dan Luas Sawah	28
2.3	Penggunaan Lahan Kering	28
2.4	Jumlah Penduduk Desa Jatijajar	29
2.5	Rasio Perbandingan Jenis Kelamin	30
2.6	Mata Pencaharian Penduduk Desa Jatijajar	31
2.7	Agama Penduduk Desa Jatijajar	33
2.8	Tingkat Pendidikan Penduduk Jatijajar	35
3.1	Data Asal dan Jumlah Anak Asuh Lokalisasi Tegalrejo tahun 1993	60
3.2	Rentang Usia Anak Asuh dari Berbagai Daerah	63
3.3	Usia Dominan PSK Lokalisasi Tegalrejo Tahun 1993	65
3.4	Data Asal dan Jumlah Anak Asuh lokalisasi Tegalrejo Tahun 1994	66

## DAFTAR GAMBAR

3.1	Peta Persebaran PSK Sebelum Keberadaan Dispenda dan PT Miliono Kerto	50
3.2	Peta Persebaran PSK Pascakeberadaan Dispenda dan PT Miliono Kerto	51
4.1	Persiapan Materi <i>Workcamp</i>	87
4.2	Kegiatan Menggambar dan Mewarnai Bersama Anak-Anak Lokalisasi Tegalrejo	88

## DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 813.2/7864/1985	96
B. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang, Ungaran, 18 Februari 1989	98
C. Daftar Nama-Nama Ibu dan Anak-Anak Asuh Tegalrejo Desa Jatijajar tahun 1993	103
D. Daftar Nama-Nama Ibu dan Anak-Anak Asuh Tegalrejo Desa Jatijajar tahun 1994	139
E. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Semarang, Nomor 821/2/2/2, tahun 1995	164
F. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, 27 Oktober 2004	168
G. Panitia Pembangunan Masjid “Al-Madinah” Tegalrejo, Desa Jatijajar Kec. Bergas, Kab. Semarang, tahun 2006	170

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang negosiasi identitas masyarakat di lokalisasi Tegalrejo yang mencakup mediasi-mediasi antarkelompok masyarakat, juga perkembangan dan struktur masyarakat lokalisasi Tegalrejo dari tahun 1977 sampai dengan 2009.

Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup empat tahapan. Tahapan pertama yaitu heuristik, merupakan langkah untuk mencari sumber sejarah baik primer maupun sekunder. Kedua pengujian sumber dan selanjutnya sintesis. Tahapan terakhir adalah historiografi yaitu usaha merekonstruksi fakta-fakta menjadi tulisan sejarah.

Lokalisasi Tegalrejo telah ada pada tahun 1977, yang juga merupakan waktu pembangunan portal dan pangkalan truk oleh Dispenda di wilayah itu. Lokalisasi ini merupakan lokalisasi yang ilegal mengingat pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan surat keputusan resmi mengenai lokalisasi tersebut. Dengan tidak adanya keputusan resmi dari pemerintah daerah membuat lokalisasi ini tidak memiliki legitimasi maupun perlindungan hukum. Meskipun demikian lokalisasi ini tetap dapat bertahan hingga sekarang. Hal tersebut karena, masyarakat lokalisasi Tegalrejo yang mayoritas adalah pendatang melakukan negosiasi identitas dengan warga asli Desa Jatijajar. Negosiasi identitas itu dilakukan melalui mediasi-mediasi seperti hal-hal administratif kependudukan dan nama wilayah, mediasi simbol keagamaan, kebutuhan ekonomi seperti mata pencaharian, pernikahan, serta mediasi dari pihak luar yang berupa LSM. Negosiasi identitas sebelum tahun 2000 bentuknya masih bersifat individual, sementara setelah tahun 2000 bentuk negosiasi itu lebih bersifat institusional.

## ***ABSTRACT***

This study is about the negotiation of community identity in the Tegalrejo's prostitution area which includes mediations between community groups, as well as the development and structure of the Tegalrejo's prostitution area community from 1977 to 2009.

In this study, researcher uses historical method which includes four stages. The first stage, heuristics, is a step to look for historical sources, both primary and secondary. Second, source testing and then, synthesis. The final stage is historiography, which is an attempt to reconstruct facts into historical writing.

Tegalrejo's prostitution area has been existed since 1977, which was also the time of the construction of a portal and truck base by Dispenda in that region. This brothel is an illegal prostitution area considering that the local government has never issued an official decree regarding the prostitution area. In the absence of an official decision from the regional government, this prostitution area has no legitimacy or legal protection. Nevertheless, this prostitution area still can survive until now. This is because the majority of Tegalrejo's prostitution area communities are migrants who are negotiating their identities with the indigenous people of Jatijajar village. Those identity negotiations are carried out through mediations such as population's administrative matters and the region's name, mediation of religious symbols, economic needs such as livelihoods, marriage, and mediation from outside parties in the form of NGOs. The form of identity negotiations before 2000 was still individual, while after 2000 negotiations were more institutional.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Prostitusi atau pelacuran yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat sering kali dianggap sebagai permasalahan sosial. Masalah prostitusi bahkan dianggap sebagai bentuk patologi sosial yang sejak dahulu sudah menjadi perhatian dan menjadi problem yang tidak pernah terselesaikan.<sup>1</sup> Prostitusi dianggap sebagai permasalahan sosial karena aktivitasnya yang merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan termasuk moral, susila, hukum dan agama.<sup>2</sup> Adanya kegiatan prostitusi di tengah masyarakat merupakan suatu problem yang dilematis karena tindakan preventif yang dilakukan berbagai pihak seperti masyarakat, institusi pemerintahan, dan institusi agama tidak dapat serta merta menghilangkan penyakit masyarakat ini. Tindakan pembubaran dan penggusuran tempat- tempat prostitusi sering kali juga tidak benar-benar dapat menghilangkan kegiatan prositusi itu sendiri karena pelakunya hanya berpindah tempat ke lokasi lain untuk melakukan aktivitas yang sama. Para pekerja seks komersial (PSK) dari berbagai daerah juga silih berganti datang setiap tahunnya untuk terjun ke dunia prostitusi, sehingga melanggengkan praktek- praktek prostitusi yang telah ada.

Eksistensi dari keberadaan praktik prostitusi yang tidak pernah hilang seiring perkembangan zaman disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang melatar belakangi kegiatan tersebut. Interaksi tiga faktor yaitu faktor permintaan, faktor persediaan dan faktor perantara dianggap menjadi faktor-faktor yang dapat

---

<sup>1</sup>Ikawati dkk., *Pengkajian Permasalahan Pelacuran Anak* (Yogyakarta: Departemen Sosial RI Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2004), hlm. 12.

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 239.

melanggengkan eksistensi kegiatan prostitusi.<sup>3</sup> Faktor permintaan sendiri dipahami sebagai faktor yang menarik seseorang ke dalam pelacuran di berbagai sektor baik melalui turisme, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Faktor persediaan dianggap sebagai *trigger* atau pemicu yang mendorong seseorang ke dalam pelacuran seperti sikap terhadap pernikahan, motif untuk berkuasa, dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Faktor ini dianggap sebagai faktor yang membuat seseorang tergiur untuk cepat mendapatkan materi tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Sementara faktor yang terakhir yaitu faktor perantara dapat diartikan sebagai faktor yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan prostitusi di suatu wilayah. Tanpa adanya faktor perantara, kegiatan prostitusi tidak dapat berjalan dan terorganisasi dengan baik. Banyak orang yang terjun menjadi perantara karena menganggap sebuah kegiatan prostitusi merupakan ladang bisnis.

Perempuan dapat terjebak pada industri seks komersial juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Konsep *modeling* atau peniruan merupakan salah satu aspek bagaimana perempuan mengikuti jejak perempuan lainnya yang tinggal dalam satu lingkungan. Seorang wanita tunasusila yang sukses ketika kembali ke desanya akan memamerkan kesuksesan dan gaya hidup barunya sehingga menimbulkan kecemburuan perempuan lain. Melalui proses itulah banyak perempuan meniru dan saling berkompetisi menunjukkan kekayaan yang mereka punya. Pengaruh lingkungan yang selanjutnya adalah adanya sikap permisif dari lingkungan untuk menjadi seorang wanita tunasusila. Dalam hal ini suatu lingkungan menganggap wajar pekerjaan warganya sebagai pekerja seks karena merupakan pekerjaan yang menghasilkan. Oleh karena itu, sangat boleh seorang perempuan menjadi pekerja seks komersial di dalam lingkungan yang melegitimasi pekerjaan tersebut. Pengaruh lingkungan yang terakhir yang menyebabkan perempuan terjebak di dalam industri seks komersial adalah melalui konsep patriarkal dalam struktur masyarakat. Konsep patriarkal ini merupakan

---

<sup>3</sup>Koentjoro, *On the Spot Tutur dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Qalam, 2004), hlm. 92.

representasi dominasi dari kaum laki-laki sehingga ketika bicara seks di dalam konsep patriarkal, maka perilaku seks perempuan diatur dan dikontrol melalui perspektif laki-laki. Pengaruh- pengaruh lingkungan ini menjadi pokok ketika kita melihat faktor dari eksistensi prostitusi di Indonesia.<sup>4</sup>

Keberadaan lokalisasi meskipun memiliki peran yang positif di masyarakat, tetap menimbulkan pro dan kontra antara yang mendukung dan yang mengecam keberadaan lokalisasi itu sendiri. Aktivitas komersialisasi seks atau prostitusi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai sebuah masalah. Demikian pula yang terjadi di Tegalrejo atau Tegalpanas yang berada di kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Lokalisasi Tegalrejo merupakan tempat prostitusi yang diperkirakan hadir sebagai dampak pembangunan pangkalan truk dan angkutan barang sekitar tahun 1977.

Kehadiran kegiatan prostitusi di tengah-tengah masyarakat tentunya mau tidak mau melibatkan interaksi masyarakat sekitar. Jika melihat pandangan Kartini, agar tidak menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, kegiatan prostitusi sebaiknya dijadikan dalam satu wilayah, sehingga dapat terkonsentrasi dalam satu tempat yaitu lokalisasi.<sup>5</sup> Hal ini seperti yang dipraktikkan di lokalisasi Sunan Kuning Semarang pada tahun 1966. Lokalisasi ini merupakan lokalisasi yang legal dan terdaftar oleh pemerintah Kota Semarang. Legalitas dari lokalisasi tersebut dibuktikan melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Madya Semarang tanggal 15 Agustus 1966, nomor 21/5/17/UU/66.<sup>6</sup> Lokalisasi Sunan Kuning menjadi satu-satunya lokalisasi di Semarang yang legal pada saat itu. Lokalisasi ini dibangun dengan tujuan untuk menampung dan merelokasi kegiatan- kegiatan prostitusi liar yang ada di wilayah Semarang. Maka dengan pemindahan PSK dari lokalisasi liar ke lokalisasi Sunan

---

<sup>4</sup>Koentjoro, *On the Spot Tutur dari Sarang Pelacur*, hlm. 16.

<sup>5</sup>Kartini Kartono. *Patologi Sosial*, hlm. 243.

<sup>6</sup> Akhriyadi Sofian, "Sejarah Lokalisasi Pelacuran Sunan Kuning di Kelurahan Kalibanteng Barat Kecamatan Semarang Barat Tahun 1966- 1984" (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 4.

Kuning, para PSK tersebut dapat berpraktik secara legal tanpa mengganggu ketertiban kota. Tidak seperti pekerja seks komersial di lokasi liar, para pekerja seks komersial yang ada di lokasi Sunan Kuning terjamin keamanan dan kesehatannya. Mereka juga diberikan rehabilitasi dan pendidikan selama berpraktik di lokasi tersebut.<sup>7</sup>

Lokasi Sunan Kuning seperti yang sudah dijelaskan di atas tentunya sangat berbeda dengan kegiatan prostitusi yang ada di lokasi Tegalrejo, Kabupaten Semarang. Lokasi di Tegalrejo merupakan lokasi yang liar dan tidak pernah mendapat izin resmi dari pemerintah setempat layaknya seperti lokasi Sunan Kuning. Dalam perkembangannya, kegiatan prostitusi ini tumbuh dan berkembang pada 1970-an. Lokasi ini diperkirakan tumbuh sejak adanya pembebasan lahan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang di Desa Jati Jajar, Kecamatan Bergas, untuk keperluan pembangunan pangkalan truk dan retribusi.

Meskipun keberadaan lokasi ini masih berupa lokasi ilegal, beberapa instansi pemerintah sering kali membantu melakukan rehabilitasi dan perawatan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan menunjuk tim rehabilitasi yang merupakan gabungan dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Beberapa kali penyuluhan diberikan kepada PSK di Tegalrejo melalui Dinas Sosial. Rehabilitasi tersebut termasuk pemberian alat-alat produksi seperti mesin jahit.<sup>8</sup> Pemberian mesin jahit kepada PSK di Tegalrejo diharapkan mampu mengentaskan para wanita tersebut agar dapat hidup melalui cara-cara yang lebih baik. Dinas sosial juga sering kali bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat seperti yayasan Salib Putih Salatiga untuk memberibantuan rehabilitasi. Dinas sosial merehabilitasi dengan cara mengirim selompok PSK ke Salatiga untuk mendapat pendidikan di Yayasan Salib Putih. Di

---

<sup>7</sup>Akhriyadi Sofian, "Sejarah Lokasi Pelacuran Sunan Kuning", hlm. 40-41.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Suyono, 10 April 2016.

Salib Putih para PSK ini dididik melalui berbagai keterampilan seperti memasak dan menjahit.<sup>9</sup>

Lokalisasi Tegarejo atau Tegalpanas ini merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Status lokalisasi Tegarejo yang illegal sebenarnya membuat keberadaan lokalisasi ini rawan untuk digusur karena tidak memiliki perlindungan hukum, tetapi lokalisasi ini masih tetap ada hingga sekarang. Dalam perjalanannya, belum pernah terjadi penolakan yang *massive* atas keberadaan lokalisasi ini. Terlebih, wilayah lokalisasi tersebut dihuni oleh penduduk asli yang mayoritas muslim. Hal ini tentu bersifat paradoksal mengingat kegiatan prostitusi tidak diperkenankan dalam ajaran agama tersebut. Akan sangat menarik jika melihat bagaimana masyarakat pendatang yang bekerja di bidang prostitusi hidup berdampingan dengan penduduk asli yang mayoritas muslim tersebut. Tentu terdapat negosiasi-negosiasi antara dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang tersebut upaya hidup berdampingan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas mengenai proses perkembangan lokalisasi di Tegarejo pada tahun 1977- 2009, serta melihat negosiasi identitas yang terjadi di dalam masyarakat lokalisasi Tegarejo. Untuk memfokuskan analisis dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian perlu dibatasi melalui beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana kehidupan masyarakat Desa Jatijajar sebagai tempat lokalisasi?
2. Bagaimana perkembangan dan struktur sosial lokalisasi Tegarejo pada tahun 1977- 2009?
3. Bagaimana bentuk-bentuk mediasi yang memungkinkan negosiasi identitas pada masyarakat lokalisasi Tegarejo?

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Prasetyo, 12 Februari 2017.

## B. Ruang Lingkup

Dalam rangka mempertegas garis batasan peristiwa dalam penulisan sejarah perlu dicakup dalam lingkup (*scope*) waktu (*temporal*) dan ruang (*spatial*) dan keilmuan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan memiliki fokus, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan tiga ruang lingkup yaitu ruang lingkup temporal, spasial, dan keilmuan.

Ruang lingkup temporal merupakan batasan waktu atas objek penelitian. Ruang lingkup temporal dalam penelitian ini adalah mulai 1977 hingga tahun 2009. Tahun 1977 dipilih sebagai batasan temporal awal objek penelitian prostitusi di Tegalrejo karena pada tahun tersebut merupakan periode awal pembebasan lahan oleh pihak Dipenda untuk pembuatan pangkalan truk dan retribusi. Meskipun pada tahun 1977 pembangunan pangkalan truk belum mulai dilaksanakan dan masih dalam tahap observasi, tetapi gejala praktik-praktik prostitusi sudah mulai terlihat pada tahun tersebut. Tahun 1998 sebenarnya merupakan penutupan pangkalan truk. Meskipun demikian, pasca-ditutupnya pangkalan truk tidak menandai pulai berakhirnya prostitusi di sana. Maka dapat dikatakan bahwa lokalisasi ini adalah lokalisasi yang tumbuh secara organis. Tahun 2009 dipilih peneliti sebagai batas akhir temporal objek penelitian prostitusi Tegalrejo karena waktu tersebut menunjukkan masuknya organisasi IWC yang dapat menjadi mediasi dalam rangka negosiasi identitas di Tegalrejo. Lingkup temporal dari tahun 1977 hingga tahun 2009 dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan lokalisasi, struktur sosial, serta negosiasi identitas antara dua kelompok masyarakat dalam rangka hidup berdampingan.

Pada penelitian ini peneliti akan memilih ruang lingkup spasial yang spesifik untuk memfokuskan langkah kerja dalam penelitian. Ruang lingkup spasial sendiri mengandung pengertian sebagai batasan suatu wilayah atau daerah dan kedudukan objek penelitian. Adapun penelitian ini mengambil ruang lingkup

---

<sup>10</sup>Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 18-19.

lokal yaitu Desa Jatijajar sebagai tempat lokasi prostitusi Tegalrejo berada. Ruang lingkup lokal ini tidak menutup kemungkinan untuk mempelajari objek-objek permasalahan atau lokalisasi lainnya yang ada di wilayah atau di wilayah Jawa Tengah demi kelengkapan data dalam penelitian. Melalui perbandingan dengan lokalisasi lain yang berada dalam satu lingkup dengan objek penelitian utama diharapkan dapat memperkaya informasi dalam penelitian ini.

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah sejarah sosial. Sejarah sosial mencakup perkembangan golongan-golongan sosial serta gaya hidupnya yang masing-masing yang mempunyai subkulturnya sendiri.<sup>11</sup> Perubahan sosial merupakan tema pokok dalam sejarah sosial yang prosesnya harus diamati dari berbagai dimensi dan aspek. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa sejarah peranan sebuah kelas, sepanjang ia tetap merupakan sejarah dari sebuah unit masyarakat dengan ruang lingkup dan waktu yang tertentu dapat digolongkan dalam sejarah sosial. Sejarah sosial dapat mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian.<sup>12</sup> Fakta sosial yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah keberadaan kegiatan prostitusi itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini tempat prostitusi di Tegalrejo memiliki efek atau pengaruh di masyarakat yang tinggal di dalam dan luar lokasi tersebut sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik tertentu.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini akan dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

*Pertama*, menjelaskan kehidupan masyarakat Desa Jatijajar baik secara demografis maupun etnografis. Pada bagian ini juga akan menjelaskan latar sosial budaya dari masyarakat desa Jatijajar. *Kedua*, menjelaskan bagaimana proses

---

<sup>11</sup>Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 158-159.

<sup>12</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 40-41.

perkembangan keberadaan lokalisasi di Tegalrejo dan struktur sosial masyarakat yang ada di dalam lokalisasi tersebut. *Ketiga*, menggambarkan bentuk-bentuk mediasi yang memungkinkan negosiasi identitas yang terjadi pada dua kelompok masyarakat sehingga membuat masyarakat pendatang yang bekerja di bidang prostitusi dapat diterima oleh penduduk asli di wilayah tersebut.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka menunjang kekayaan informasi dalam penelitian ini, penelitian melakukan tinjauan dari beberapa pustaka. Pustaka tersebut antara lain buku *Pelacuran di Indonesia* karya Terence Hull dkk., buku *Seks, Uang, dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara* karya Thanh- Dam Truong, buku *Patologi Sosial* karya Kartini Kartono, dan buku *Tutur dari Sarang Pelacur* karya Koentjoro.

Pustaka yang pertama digunakan peneliti adalah buku karya Terence Hull dkk.<sup>13</sup> Terence H. Hull dkk., dalam bukunya *Pelacuran di Indonesia* menjelaskan mengenai perkembangan pelacuran atau komersialisasi sektor seks di Indonesia sejak zaman kerajaan yang feodal, zaman penjajahan, hingga ke zaman yang lebih kontemporer. Pola-pola pelacuran oleh Terence Hull dkk. dianggap sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia. Ia memberikan contoh gambaran mengenai sistem selir yang ada di kerajaan-kerajaan Jawa seperti dua kerajaan di Mataram, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Selir dapat dikatakan representasi dalam konteks pelacuran, hal tersebut karena adanya pertukaran antara tubuh dengan hal-hal yang sifatnya material dan juga non-material. Hal tersebut karena, banyak keluarga pada masa feodal yang ingin menyerahkan atau “menjual” putrinya untuk mendapatkan materiil. Akan tetapi, ada pula motif non-material, dengan adanya motif untuk memiliki relasi dengan keluarga kerajaan dan mendapatkan keuntungan serta prestise tertentu melalui menjadi selir.

---

<sup>13</sup>Terence Hull dkk, *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)

Terence H. Hull dkk mengungkapkan bahwa sistem feodal tidak semata-mata atau sepenuhnya menunjukkan keberadaan komersialisasi industri seks yang kita kenal pada masyarakat yang modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa tersebut telah membentuk landasan bagi perkembangan industri seks yang ada saat ini.

Di dalam bukunya Hull dkk mengungkapkan bahwa pada masa kolonial, industri komersialisasi seks jauh lebih terorganisasi. Hal tersebut terbukti dengan adanya tempat-tempat yang terintegrasi dengan industri tersebut, seperti di pelabuhan, di stasiun kereta api, bahkan di kompleks-kompleks perkebunan. Tempat-tempat industri seks tersebut lahir karena adanya permintaan yang sangat banyak akibat pengiriman tenaga-tenaga dari Belanda yang mayoritas pria muda. Meskipun demikian, industri seks pada masa pendudukan pemerintah kolonial Belanda jauh berbeda dengan masa kependudukan Jepang. Pada masa kependudukan Jepang merupakan potret kelam industri seks di Indonesia karena banyak dari pekerja seks komersial tersebut dibayar dengan upah yang lebih rendah atau bahkan tidak dibayar. Banyak pula perempuan-perempuan yang tidak bekerja di industri tersebut direkrut pihak Jepang dengan iming-iming bekerja di luar negeri. Tetapi pada faktanya mereka tidak pernah sampai manapun dan hanya menjadi budak seks tentara Jepang.

Industri seks pada tahun 1950-an lahir karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Pada masa tersebut, penduduk Indonesia yang baru merdeka terkonsentrasi di Pulau Jawa yang sebagian besar tinggal di desa. Perekonomian pada masa tersebut ditandai dengan banyaknya pengangguran dan kemiskinan sehingga banyak dari penduduk desa keluar dari pertanian dan mencoba peluang untuk bekerja di kota. Pada tahun 1960 hingga 1970-an besarnya arus perpindahan penduduk ke kota meningkatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Banyak dari mereka adalah perempuan yang memiliki kemampuan dan keterampilan terbatas sehingga terjebak dalam industri seks komersial.

Selain menjelaskan mengenai perkembangan industri seks di Indonesia, Hull dkk juga menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dan industri seks, struktur organisasi industri seks, dan aspek ekonomi dari industri seks. Hull dkk

mengungkapkan bahwa melalui studinya ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelacuran heteroseksual di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa keberadaan industri seks di Indonesia bergantung pada kejelasan sikap pemerintah pusat yang masih setengah-setengah dalam menangani kasus ini. Hull dkk menambahkan bahwa pembahasan atau debat mengenai industri seks di Indonesia dianggap mengganggu stabilitas beragam aspek, namun ketakutan pada ketidakstabilan aspek-aspek tersebut harus dibayar dengan eksploitasi perempuan dan penularan penyakit HIV.

Melalui buku ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan industri seks komersial di Indonesia yang sangat bermanfaat pada penelitian ini. Selain menjelaskan mengenai industri seks komersial di Indonesia, buku ini juga mampu menggambarkan kebijakan pemerintah dalam industri seks, struktur organisasi industri seks, serta aspek ekonomi dalam industri seks. Buku ini memiliki relevansi dengan penelitian karena memiliki kesamaan topik bahasan yaitu mengenai pelacuran di Indonesia serta ragam permasalahan yang timbul melalui aktifitas tersebut.

Buku kedua yang digunakan berjudul *Seks, Uang, dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara* karya Thanh-Dam Truong.<sup>14</sup> Buku ini terbagi menjadi dua bagian, pertama berisi kerangka analitik terhadap pelacuran, sedangkan bagian kedua membahas turisme internasional dan pelacuran di Asia Tenggara.

Truong di dalam bukunya bagian pertama menjelaskan, bahwa dalam mengkaji masalah pelacuran dapat ditinjau dari eksploitasi seksual dan produk kapital. Eksploitasi seksual menurut Truong terjadi karena adanya unsur dominan dari gender. Laki-laki dalam hal ini memiliki peran yang dominan terhadap perempuan terkait eksploitasi seksual. Hal ini karena adanya sistem patriarki dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Truong di bawah kapitalisme, patriarki berfungsi sebagai kekuatan ideologis yang mentransformasikan peran seks

---

<sup>14</sup> Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang, dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1992)

tradisional dalam keluarga ke dalam pembagian kerja seksual dengan keterampilan-keterampilan yang disesuaikan dalam pasar kerja. Perubahan atau transformasi seksualitas kepada kerja seksual (sebagai produk kapital) hadir karena adanya kekacauan kekerabatan melalui dislokasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Truong, untuk memahami perubahan bentuk pengorganisasian seksualitas harus juga melihat perubahan bentuk hubungan kekerabatan.

Pada bagian ke dua dalam bukunya, Truong menjelaskan kebangkitan dan ekspansi turisme internasional sebagai sebuah industri dalam sektor jasa. Hal tersebut lahir karena pariwisata dan pelacuran di Asia Tenggara memiliki keterkaitan dengan konsep *leisure*. *Leisure* menurut Truong dapat diartikan sebagai aktivitas pribadi dengan makna eksistensial (pemenuhan, kepuasan, dan kreativitas pribadi) atau juga sebagai waktu sosial, waktu di luar institusi kerja yang ditentukan oleh organisasi produksi dan reproduksi. Konsep *leisure* itu sendiri lahir dari masyarakat industri pada abad 19 dan 20 yang menuntut hak mereka untuk mendapatkan istirahat dan waktu luang. Melalui waktu luang yang dimiliki para kelas pekerja, muncul beragam perjalanan wisata yang menyuburkan pula sektor jasa seks di wilayah sekitarnya. Truong mengungkapkan lebih lanjut bahwa kebangkitan turisme dan pelacuran di Asia Tenggara merupakan hasil kebijakan yang condong pada investasi industri jasa personal yang berperan penting memelihara kelas pekerja kelas internasional.

Buku ini memiliki kelebihan dalam menggambarkan kegiatan prostitusi dari sudut pandang turisme di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, buku ini juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang membangkitkan kegiatan prostitusi dalam turisme di Asia Tenggara kaitannya dengan konsep *leisure* dan perkembangan moda transportasi. Di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana sistem kapitalisme dan sistem budaya patriarki memiliki peran signifikan dalam kegiatan pelacuran di Asia Tenggara. Melalui topik pembahasan dan cakupan spasial yaitu pelacuran di Asia Tenggara, buku ini sangat bermanfaat sebagai sumber pustaka pada penelitian ini.

Buku ke tiga yang digunakan dalam tinjauan pustaka ini adalah buku berjudul *Patologi Sosial* karya Kartini Kartono.<sup>15</sup> Di dalam bukunya Kartini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelacuran baik kaitannya dengan norma adat dan norma agama, hubungan antara seks dan pelacuran, fungsi pelacuran dan penyebab pelacuran, motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran, serta menjelaskan dampak-dampak pelacuran.

Kartini mengungkapkan bahwa sejarah pelacuran terkait norma adat dan agama sudah lahir sejak zaman mesir kuna, Babilonia, dan India. Praktik- praktik pelacuran pada masa itu dipaksakan kepada kaum wanita untuk menghormati dewa-dewa. Upacara-upacara keagamaan selalu dikaitkan dengan praktik pelacuran yang dalam hal ini, hak dan kekuasaan para dewa tersebut diproyeksikan ke dalam hak dan kekuasaan pria. Kartini menjelaskan lebih lanjut bahwa pada hakikatnya prostitusi religius dianggap penyatuan diri dengan sang dewa.

Terkait norma adat dan agama, menurut Kartini pelacuran sudah dikecam atau dikutuk oleh masyarakat sejak lama melalui dua institusi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pada umumnya norma adat melarang pelacuran, akan tetapi setiap daerah memiliki peraturan yang tidak sama dalam mengatasi masalah tersebut. Kartini mencontohkan melalui masyarakat Eskimo dan Mentawai yang memperkenankan masyarakat melakukan perkawinan tanpa pernikahan. Oleh karena itu, pelacuran tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang karena adanya ragam masyarakat sehingga harus melihat sosial budaya masyarakat dalam memandang pelacuran.

Pelacuran lahir karena adanya bentuk relasi seks yang abnormal. Kartini menjelaskan bahwa bentuk relasi seks yang abnormal ini memiliki ciri-ciri seperti tidak bertanggung jawab, didorong oleh kompulsi-kompulsi (tekanan paksaan), dan impuls-impuls yang abnormal. Abnormalitas relasi seks oleh Kartini dibagi menjadi tiga yaitu abnormalitas seks yang disebabkan oleh *dorongan seksual*

---

<sup>15</sup>Kartini. *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1983).

*abnormal*, abnormalitas seks yang disebabkan oleh *partner seks yang abnormal*, dan abnormalitas seks dengan cara-cara yang abnormal dalam pemuasan dorongan seksualnya. Pelacuran sendiri oleh Kartini digolongkan pada abnormalitas seks yang disebabkan oleh dorongan seksual yang abnormal.

Kartini di dalam bukunya menjelaskan bahwa pelacuran juga memiliki fungsi tertentu. Fungsi-fungsi tersebut antara lain menjadi sumber pelancar dunia bisnis, menjadi sumber hiburan bagi kelompok atau individu, dan menjadi sumber pelayanan dan hiburan bagi orang cacat. Sementara peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran antara lain karena tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran, adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, komersialisasi dari seks, dekadensi moral, hukum permintaan ekonomi, percampuran budaya asing, serta perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industri.

Terdapat beragam motif yang melatarbelakangi pelacuran. Kartini menjelaskan motif utama pelacuran pada wanita adalah untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Hal tersebut juga dipengaruhi minimnya pemahaman seseorang, kurangnya pendidikan, serta buta huruf. Motif lainnya yang dijelaskan Kartini adalah karena adanya disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga. Disorganisasi dan disintegrasi ini dapat berbentuk konflik internal keluarga serta *broken homes*. Motif lain yang mampu melatar belakangi pelacuran adalah tidak menutup kemungkinan karena adanya dorongan seksual yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan *hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria atau suami.

Pelacuran dapat berdampak pada segi yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat. Kartono menjelaskan bahwa pelacuran dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kulit dan kelamin. Selain itu, dampak lain dari pelacuran adalah selalu berkorelasi dengan kriminalitas dan penggunaan narkoba. Pelacuran oleh Kartono dianggap sebagai media untuk pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Melalui kegiatan eksploitasi manusia ini dapat menguntungkan golongan atau kelompok tertentu seperti

germo, calo, penjaga, sehingga akan menarik orang-orang untuk terjun ke bisnis tersebut.

Sebagai telaah pustaka, buku ini sangat bermanfaat dalam penelitian ini karena dapat menggambarkan secara detail mengenai aspek- aspek penting dalam kegiatan prostitusi. Buku ini mampu menjelaskan kegiatan prostitusi dari berbagai sudut pandang baik hukum, agama, sosial, dan budaya sehingga dinilai memiliki tingkat objektivitas yang baik. Selain itu melalui buku ini juga terdapat beragam informasi mengenai pembagian jenis-jenis lokalisasi serta cara penanggulangan prostitusi. Kelebihan dari buku ini tidak hanya memberikan informasi seputar permasalahan kegiatan prostitusi, melainkan juga memberikan gambaran penanganan atau solusi dalam kegiatan prostitusi. Melalui pembahasan yang dimuat dalam buku ini, memiliki relevansi dan konten yang sangat signifikan sebagai sumber pustaka penelitian ini.

Sumber pustaka ke empat adalah buku berjudul *On the Spot Tutur dari Sarang Pelacur* karya Koentjoro.<sup>16</sup> Buku ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi seorang pelacur baik dari segi personal maupun lingkungan. Melalui pemahaman faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan menjadi pelacur itulah Koentjoro mencoba merumuskan pengembangan program-program pengendalian pelacuran di Indonesia. Riset awal Koentjoro dalam buku ini bermula pada riset-riset mengenai pelacuran di Indonesia yang pada umumnya mengeksplorasi daerah-daerah perkotaan. Koentjoro di dalam bukunya menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan prostitusi tidak serta merta harus memfokuskan diri pada lokalisasi tersebut, melainkan dapat melalui hulunya, yaitu komunitas desa yang menghasilkan para pekerja seks komersial. Melalui buku ini mampu mengungkapkan identifikasi faktor-faktor pelacuran secara personal karena riset ini melalui metode observasi partisipatoris, *interview*, studi kasus, dan diskusi kelompok kecil.

---

<sup>16</sup>Koentjoro, *On the Spot Tutur dari Sarang Pelacur* (Yogyakarta: Qalam, 2004)

Hasil riset Koentjoro yang diungkapkan dalam buku ini merupakan kerangka konseptual mengenai faktor-faktor pelacuran di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa berkembangnya pelacuran merupakan hasil interkasi dari beberapa faktor seperti faktor permintaan, faktor perantara, dan faktor penawaran. Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, Koentjoro menilai bahwa akumulasi tekanan sosial masa kini juga dapat mempengaruhi seorang perempuan untuk menjadi seorang pelacur. Riset Koentjoro dalam buku ini juga berusaha untuk memahami bagaimana masyarakat dalam pedesaan yang sama, perempuannya dapat menjadi pelacur, sedangkan yang lain tidak. Oleh karena itu, analisis Koentjoro dalam buku ini ditekankan bukan pada perempuan-perempuan pedesaan yang seragam, tetapi bagaimana seorang perempuan bereaksi berbeda terhadap berbagai tekanan sosial dan personal.

Buku ini dapat menjadi sumber pustaka yang bermanfaat pada penelitian ini karena dapat memberikan penjelasan yang kompleks mengenai pelacuran di Indonesia. Kelebihan dari buku ini adalah adanya penjelasan dari berbagai aspek baik penjelasan kultural, sosial, dan psikologis dalam mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang perempuan menjadi pelacur. Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut tidak hanya dijelaskan dalam satu institusi yang seragam, melainkan berbeda-beda. Institusi tersebut antara lain factor keluarga, komunitas, dan lingkungan. Berdasar pembahasan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, buku ini dapat memperkaya beragam informasi mengenai pelacuran dan faktor- faktornya dalam penelitian ini.

Sumber pustaka kelima yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan esai John Ingelson berjudul "Prostitution in Colonial Java" dalam buku *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia, Essays in honour of Proffesor J.D Legge*.<sup>17</sup> Di dalam esainya Ingelson menjelaskan mengenai perkembangan prostitusi di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Ia menyebutkan bahwa kegiatan prostitusi

---

<sup>17</sup>J Ingelson, *Prostitution in Colonial Java*, dalam D.P Chandler dan M.C Ricklefs, *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essay in Honour of Prof. J.D. Ledge* (Melbourne: Monash University Press, 1986)

di Indonesia sudah berlangsung semenjak keberadaan pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Faktor kaum militer dalam jumlah banyak yang dikirim dari Belanda ke Indonesia merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam perkembangan prostitusi di Indonesia khususnya di Jawa. Ia mengungkapkan bahwa pada mulanya banyak militer Belanda yang rata-rata merupakan laki-laki muda tinggal dengan para gundik lokal di Jawa. Hubungan antara militer Belanda dengan kaum gundik ini banyak menimbulkan keresahan serta kecemasan dari penduduk lokal yang mayoritas memeluk Islam. Semenjak terjadinya protes, para militer muda ini akhirnya berpindah ke tempat-tempat prostitusi untuk memuaskan hasrat mereka. Muncul banyak permintaan dari tempat-tempat prostitusi untuk mempekerjakan para perempuan lokal. Ingelson menambahkan bahwa pertumbuhan industri di sekitar tahun 1900-an juga menyebabkan mobilitas besar-besaran penduduk desa ke kota. Mobilitas para pekerja yang mayoritas laki-laki ini disebutkan juga merupakan faktor meningkatnya permintaan di tempat-tempat prostitusi untuk menarik pekerja wanita pada saat itu.

Di dalam esasinya, Ingelson juga menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur kegiatan prostitusi pada masa kolonial. Ingelson menyebutkan bahwa regulasi atau kebijakan dalam mengatur kegiatan prostitusi diberlakukan sejak adanya indikasi penyakit menular akibat aktivitas pelacuran. Di Surabaya pada tahun 1920-an misalnya, pemerintah kala itu sudah memberlakukan pengecekan kesehatan setiap periode waktu tertentu. Setiap *brothels* dan tempat-tempat prostitusi diwajibkan untuk mendaftarkan para pekerjanya agar dapat dipantau. Setiap wanita tunasusila juga diwajibkan melakukan pengecekan kesehatan agar mendapatkan sertifikat yang wajib mereka pajang di depan kamar dimana mereka praktek sebagai bukti legalitas dan keamanan. Akan tetapi regulasi atau kebijakan pemerintah pada masa kolonial tidak dapat menghentikan atau meminimalisir kegiatan prostitusi. Banyak para wanita enggan untuk diperiksa kesehatannya dan menggunakan sertifikat yang telah kadaluarsa. Para pengelola *brothels* dan tempat-tempat prostitusi juga enggan menjalankan peraturan pemerintah semenjak adanya penarikan biaya untuk pengecekan kesehatan para wanita tuna susila.

Ingelsson di dalam esainya tidak hanya menjelaskan perkembangan kegiatan prostitusi pada masa kolonial, akan tetapi juga menggambarkan gejolak politik yang terjadi akibat adanya aktifitas tersebut. Ia menjelaskan bagaimana salah satu organisasi Indonesia yang telah lahir yaitu Sarekat Islam, menentang keras keberadaan kegiatan prostitusi yang ada di Jawa. Prostitusi dinilai bertentangan dengan syariat Islam tentunya tidak sejalan dengan organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini menjadi salah satu tonggak perlawanan kegiatan prostitusi di Jawa masa kolonial melalui penyelenggaraan forum nasional pada tahun 1914 di Bandung yang menggaungkan propaganda anti prostitusi. Upaya yang dilakukan Sarekat Islam pada masa itu memang tidak dapat menghentikan kegiatan prostitusi, akan tetapi upaya mereka dapat memberi *pressure* untuk meminimalisir aktifitas tersebut.

Melalui esai dari Ingelsson ini akan sangat bermanfaat sebagai sumber pustaka pada penelitian ini. Buku ini memiliki kelebihan yang tidak hanya menjelaskan mengenai perkembangan akan kegiatan prostitusi di Jawa, akan tetapi juga menggambarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, gejolak, serta perubahan sosial atas keberadaan kegiatan prostitusi di Jawa pada masa kolonial. Melalui gambaran kegiatan prostitusi pada masa kolonial, diharapkan dapat terlihat pola-pola tertentu yang terkait kegiatan prostitusi pada masa reformasi dan tentunya sesuai dengan objek pada penelitian ini.

Pustaka terakhir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan skripsi berjudul *Sejarah Lokalisasi Pelacuran Sunan Kuning di Kelurahan Kalibanteng Barat Kecamatan Semarang Barat Tahun 1966-1984* yang ditulis oleh Akhriyadi Sofian.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas perkembangan lokalisasi Sunan Kuning yang berada di Semarang dari tahun 1966-1984. Objek temporal tersebut dipilih peneliti dengan mempertimbangkan aspek legalitas yang diberikan pemerintah kepada lokalisasi tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota Madya Semarang tanggal 15 Agustus 1966, nomor

---

<sup>18</sup> Akhriyadi Sofian, "Sejarah Lokalisasi Pelacuran Sunan Kuning di Kelurahan Kalibanteng Barat Kecamatan Semarang Barat Tahun 1966- 1984" (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, 2004)

21/5/17/UU/66. Sementara pada tahun 1984 dipilih sebagai waktu temporal mengingat lokalisasi Sunan Kuning dicabut izinnya sebagai lokalisasi yang resmi oleh pemerintah Kota Semarang.

Melalui sumber pustaka ini dapat membantu memberikan informasi mengenai pengelolaan lokalisasi yang resmi atau legal oleh pemerintah daerah. Pustaka ini dapat memberikan gambaran yang baik mengenai kehidupan lokalisasi dari hilir hingga hulu yang ada di bawah pengawasan pemerintah. Selain itu, di dalam pustaka ini juga menjelaskan mengenai penanganan kasus-kasus tertentu seperti penanganan isu kriminalitas serta isu kesehatan yang ada di lokalisasi Sunan Kuning. Melalui pembacaan pustaka ini dapat memberikan komparasi yang lebih jelas mengenai lokalisasi yang statusnya resmi serta yang tidak resmi atau ilegal.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kegiatan prostitusi merupakan penjualan jasa atas hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, disertai eksploitasi dan komersialisasi seks.<sup>19</sup> Sementara Ikawati menjelaskan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan suatu peristiwa penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki guna pemuasan nafsu, melalui hubungan seksual, memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian dengan imbalan pembayaran.<sup>20</sup>

Kegiatan prostitusi sebagai eksploitasi seksual dinilai cukup berbahaya bagi kelangsungan kaum perempuan. Hal ini karena terkadang kaum perempuan tidak benar-benar ingin terjun ke dunia prostitusi atas keinginannya sendiri akan tetapi atas dorongan dan paksaan dari pihak lain. Sebagai contoh kasus-kasus para perempuan rela terjun ke dunia prostitusi karena ingin membantu permasalahan ekonomi keluarganya. Dunia prostitusi dianggap jalan singkat untuk

---

<sup>19</sup>Kartini. *Patologi Sosial*, hlm. 207.

<sup>20</sup>Ikawati, dkk. *Pengkajian Permasalahan Pelacuran Anak*, hlm. 10.

mengentaskan ekonomi. Akan tetapi, melalui jalur tersebut seorang wanita tunasusila belum tentu memperoleh kekayaan, ia justru terjerumus pada *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Perdagangan manusia melalui kegiatan prostitusi ini dapat menimbulkan aktivitas pelacuran anak perempuan. Terjadinya pelacuran anak perempuan dapat disebabkan oleh permasalahan kultural. Anak-anak perempuan khususnya di Indonesia sering sudah dianggap matang atau dewasa sebelum mereka menginjak usia 18 tahun. Mereka bahkan sudah dianggap layak untuk menikah pada usia 13 tahun sehingga anak yang belum menikah pada usia 15 tahun merupakan aib bagi keluarga. Memiliki anak gadis merupakan aset sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan keluarga ekonomi rendah untuk memanfaatkan “aset” yang mereka miliki yaitu antara segera menikahkannya di usia muda atau mengirimnya ke dalam industri seks komersial. Terjadinya perdagangan anak perempuan menurut Ikawati karena juga dipengaruhi lemahnya legislasi dan sistem kontrol dari pemerintah untuk mencegah praktek perdagangan manusia.<sup>21</sup> Selama ini lokalisasi juga tidak dapat sepenuhnya mengakomodasi kegiatan prostitusi dengan baik, sehingga terdapat berbagai permasalahan yang timbul mengenai pengelolaan kegiatan prostitusi dan lokalisasi.

Lokalisasi merupakan tempat dimana kegiatan prostitusi dijalankan dengan segenap peraturan yang tujuannya untuk mengatur dan mengontrol pelaku-pelaku kegiatan prostitusi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam lokalisasi, wanita tuna susila seolah-olah difasilitasi untuk melancarkan prakteknya dalam mencari uang. Melalui lembaga tersebut PSK di jaga dan mendapatkan perlindungan dari para anggota pengelola prostitusi. Lokalisasi tidak hanya memfasilitasi PSK saja, tetapi juga memfasilitasi para konsumen atau pria hidung belang sebagai sumber penghasilan wanita tuna susila. Meskipun segenap peraturan diberlakukan di dalam lokalisasi, tetapi tidak memungkiri terjadinya pelanggaran dan penyelewengan tata tertib serta permasalahan kriminalitas di

---

<sup>21</sup>Ikawati, dkk., *Pengkajian Permasalahan Pelacuran Anak*, hlm. 13.

dalam lokalisasi. Kontrol dan pengaturan yang lemah dari pengelola lokalisasi seringkali tidak dibarengi dengan campur tangan pemerintah yang signifikan sehingga banyak lokalisasi yang di luar kontrol. Hal ini bisa dilihat juga bagaimana pemerintah menanggulangi lokalisasi di Indonesia. Terdapat lokalisasi yang legal (terdaftar) di bawah peraturan pemerintah, tetapi juga banyak lokalisasi yang illegal (tidak terdaftar) dan tidak mendapat izin resmi dari pemerintah.<sup>22</sup> Hal ini menyebabkan lokalisasi illegal tidak memiliki perhatian yang cukup dari pemerintah, sehingga banyak masalah sosial yang muncul dari keberadaan lokalisasi ini.

Menurut Kartini, keberadaan lokalisasi sebenarnya memiliki dampak positif jika bertujuan untuk menjauhkannya dari masyarakat umum, sehingga pengaruh-pengaruh immoral dari praktik prostitusi dapat diminimalisasi.<sup>23</sup> Dengan adanya lokalisasi diharapkan adanya limitasi untuk mengakses tempat tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki keperluan dapat masuk ke tempat tersebut, sehingga menjauhkan dari jangkauan anak-anak dan remaja. Selain itu melalui lokalisasi dinilai mampu mempermudah pengawasan para wanita tuna susila mengenai kesehatan dan keamanannya. Untuk menekan penyebaran penyakit, petugas kesehatan dapat dengan mudah menjangkau wanita tuna susila yang berada di suatu lokalisasi. Hal ini akan sangat menyulitkan jika wanita tuna susila menyebar dan tidak dapat teridentifikasi keberadaannya.

Tujuan utama lokalisasi selain untuk mengisolasi tempat tersebut agar tidak mudah terjangkau dari masyarakat umum adalah untuk mengentaskan wanita tuna susila itu sendiri dari industri seks komersial. Kartini menjelaskan bahwa bimbingan mental bagi para wanita tuna susila seperti rehabilitasi dan resosialisasi dapat lebih mudah jika terdapat wadah yang menampung para wanita tuna susila ini.<sup>24</sup> Oleh karena itu rehabilitasi bisa sekaligus dilakukan melalui adanya lokalisasi sebagai wadah kegiatan prostitusi. Rehabilitasi dan resosialisasi tersebut

---

<sup>22</sup>Kartini. *Patologi Sosial*, hlm. 240.

<sup>23</sup>Kartini, *Patologi Sosial*, hlm. 244.

<sup>24</sup>Kartini, *Patologi Sosial*, hlm. 244.

dapat berupa bimbingan konseling untuk mengembalikan kepercayaan diri mantan PSK untuk kembali ke masyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga dapat berupa pendidikan keterampilan dan latihan-latihan kerja agar mantan PSK dapat bertahan hidup ketika lepas dari kegiatan seks komersial.

Prostitusi dan lokalisasi berdasar aktivitasnya oleh Kartini dibagi menjadi dua jenis, yaitu lokalisasi yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Prostitusi yang terdaftar menurut Kartini pelakunya diawasi oleh bagian *vice control* dari kepolisian, yang juga dibantu oleh jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya para pelaku prostitusi dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Setiap periode tertentu para pelaku prostitusi yang terdaftar wajib memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan serta berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hal tersebut menurut Kartini sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

Lokalisasi yang tidak terdaftar oleh Kartini didefinisikan sebagai kegiatan prostitusi yang dilakukan secara liar dan tersembunyi. Pelaku kegiatan prostitusi yang tidak terdaftar dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Kegiatannya tidak terorganisasi dengan baik, serta tempatnya yang tidak menentu. Praktik yang dilakukan sering kali melalui calo atau pun panggilan. Kartini menganggap tingkat kesehatan pada para pelaku prostitusi yang tidak terdaftar ini sangatlah rendah atau diragukan karena mereka hampir tidak pernah memeriksakan dirinya kepada petugas kesehatan.

Terkait dengan konsep identitas, identitas sosial adalah pengetahuan seseorang bahwa ia termasuk dalam kategori atau kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki identitas sosial yang sama atau memandang diri mereka sebagai anggota dari kategori sosial yang sama. Melalui proses perbandingan sosial, orang-orang yang mirip dengan diri dikategorikan dengan diri dan diberi label *in-group*; orang yang berbeda dari diri dikategorikan sebagai kelompok keluar.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Michael A. Hogg, and Dominic Abrams. *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes* (London: Routledge, 1988)

Dua proses penting yang terlibat dalam pembentukan identitas sosial, yaitu kategorisasi diri dan perbandingan sosial, menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi dari kategorisasi diri adalah aksentuasi kesamaan yang dirasakan antara diri dan anggota dalam kelompok lainnya, dan aksentuasi dari perbedaan yang dirasakan antara anggota kelompok sendiri dan keluar. Penekanan ini terjadi untuk semua sikap, kepercayaan dan nilai-nilai, reaksi afektif, norma perilaku, gaya bicara, dan sifat-sifat lain yang diyakini berkorelasi dengan kategorisasi antarkelompok yang relevan. Konsekuensi dari proses perbandingan sosial adalah aplikasi selektif dari efek akuisisi, terutama untuk dimensi-dimensi yang akan menghasilkan hasil peningkatan diri bagi diri. Secara khusus, harga diri seseorang ditingkatkan dengan mengevaluasi *in-group* dan *out-group* pada dimensi yang membuat *in-group* dinilai secara positif dan *out-group* dinilai secara negatif.<sup>26</sup>

Melalui pemahaman bahwa subjek akan selalu dapat melakukan kategorisasi diri dan perbandingan sosial dalam melihat identitasnya, maka diperlukan negosiasi untuk berinteraksi dengan yang di luar kelompok atau *out-group*. Negosiasi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak berusaha untuk menyelesaikan tujuan yang bertentangan.<sup>27</sup> Negosiasi juga dapat dipahami sebagai suatu cara untuk mencapai kesepakatan.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis sejarah kritis dalam mengungkapkan unsur- unsur yang fundamental terkait objek penelitian. Louis Gottschalk menjelaskan bahwa di dalam penelitian sejarah kritis terdapat

---

<sup>26</sup>Jan E. Stets & Peter J. Burke, *Theory and Social Identity Theory* (Social Psychology Quarterly, Vol. 63, No. 3, September 2000)

<sup>27</sup>Seng Joo Seng; Elizabeth, Ngah-Kiing Lim, *Strategies for Effective Cross – Cultural Negotiation*: Tahun (Singapore: McGrawHill, 2004), hlm. 6.

<sup>28</sup>Oxford Learner`s Dictionary (Oxford University Press: 2004)

konsensus terkait tahapan atau langkah-langkah penelitian.<sup>29</sup> Tahapan tersebut antara lain pemilihan subjek untuk diselidiki, pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subjek tersebut, Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati-tidaknya, pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya daripada sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati, serta sintesa daripada sumber-sumber yang telah diperoleh melalui langkah historiografi. Kajian subjek sejarah melalui metode sejarah kritis secara umum melalui empat tahapan. Tahapan tersebut antara lain heuristik, kritik sumber, intepretasi, dan hitoriografi.

Tahapan *pertama* yaitu heuristik. Heuristik merupakan langkah pengumpulan data baik primer maupun sekunder yang terkait dengan subjek penelitian. Data-data tersebut dapat berupa dokumen-dokumen tertulis maupun berupa lisan yang memuat isi peristiwa sejarah. Sumber primer tertulis dalam penelitian ini akan menggunakan arsip-arsip pencatatan lokal dari pengelola prostitusi di Tegalrejo. Arsip-arsip tersebut banyak memuat informasi yang spesifik terkait kegiatan prostitusi di Tegalrejo. Sumber primer tertulis lainnya diperoleh melalui arsip koran Suara Merdeka yang terkait dengan lokasi objek penelitian.

Selain menggunakan sumber primer tertulis, dalam penelitian ini juga menggunakan sumber lisan yang dikumpulkan melalui metode wawancara sejarah lisan. Sejarah lisan mampu menghasilkan bahan-bahan yang terkadang tidak dapat diperoleh melalui sumber sejarah konvensional.<sup>30</sup> Melalui sumber sejarah lisan diharapkan mampu membuka peluang dalam memperoleh informasi untuk merekonstruksi sejarah objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara sejarah lisan dilakukan dengan tokoh-tokoh atau pelaku sejarah prostitusi di Tegalrejo

---

<sup>29</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 34.

<sup>30</sup>Lysa Hong, *Ideologi dan lembaga Sejarah Lisan di Asia Tenggara, dalam Lim Pui Huen, Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode* (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 62.

mulai tahun 1977 hingga 2009. Para pelaku sejarah yang menjadi objek penelitian ini antara lain tokoh masyarakat di Tegalrejo, muncikari atau penyedia dan perantara jasa seks, PSK di lokasi Tegalrejo, pegawai Dispenda, pegawai PT. Miliono Kerto, Pihak LSM Salib Putih, Pihak LSM PKBI, IWC dan pihak-pihak yang mampu mengembangkan informasi mengenai prostitusi di Tegalrejo pada tahun 1977 hingga 2009. Sumber lisan dalam penelitian ini sebagian besar menjadi rujukan utama dalam proses historiografi dengan selalu mempertimbangkan verifikasi dari sejumlah informan serta sumber tertulis.

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber sekunder untuk memperkaya informasi data penelitian. Sumber sekunder dapat berupa literatur yang terkait dengan tema objek penelitian. Literatur-literatur yang digunakan tersebut sebagian besar merupakan literatur sejarah sosial khususnya lingkup prostitusi dan pelacuran. Selain literatur sejarah sosial, peneliti juga menggunakan arsip inventaris Desa Tegalrejo sebagai sumber sekunder untuk melengkapi proses rekonstruksi sejarah prostitusi di Tegalrejo.

Dalam rangka memperoleh sumber yang kredibel dan mendekati kebenaran dari suatu peristiwa sejarah, peneliti menggunakan kritik sumber sebagai langkah *kedua* dalam penelitian sejarah kritis. Kritik sumber dalam penelitian sejarah kritis dibagi menjadi dua bagian yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berfungsi untuk melihat keaslian atau keautentikan data dari sumber tertulis. Kritik ekstern melihat dan menilai keaslian sumber dari aspek fisik. Langkah ini merupakan langkah awal peneliti dalam kritik sumber sebelum meneliti keaslian sumber dari sisi intern. Langkah berikutnya dalam kritik sumber adalah kritik intern. Kritik intern berusaha memperoleh kesaksian yang dapat dipercaya serta sumber tertulis yang kredibel melalui perbandingan atau koraborasi. Aspek biografis, aspek geografis, aspek kronologis, serta aspek fungsional dapat menjadi pertimbangan dalam kritik sumber.<sup>31</sup> Melalui pertimbangan berbagai aspek dalam kritik sumber tersebut diharapkan diperoleh data penelitian yang sedekat-dekatnya dengan peristiwa sejarah kaitannya sejarah prostitusi di Tegalrejo.

---

<sup>31</sup>Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. hlm. 97.

Langkah ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan proses penafsiran dari fakta-fakta sejarah yang disusun secara integral dan melalui proses seleksi sejarah sehingga menjadi kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti dalam hal ini perlu menyeleksi fakta-fakta sejarah yang sesuai dan memiliki koherensi dengan objek penelitian. Dalam penulisannya, periodisasi menjadi faktor penting dalam langkah interpretasi agar setiap fakta yang diungkapkan dapat tersusun secara berurutan dan berkesinambungan.

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi. Historiografi merupakan pengungkapan atau pemaparan fakta dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil analisis dan sintesis peneliti terhadap sumber-sumber sejarah. Langkah ini merupakan penyajian fakta secara utuh mencakup periodisasi antara 1977 hingga 2009 pada kegiatan prostitusi di Tegalrejo. Penyajian fakta secara utuh ini diharapkan mampu menghasilkan suatu bentuk karya sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta objektivitasnya.

Terkait dengan sensitifnya penelitian ini untuk beberapa pihak, maka dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya menjaga privasi serta keamanan informan yang tidak bersedia dipublikasikan data aslinya. Oleh karena itu, beberapa nama informan disamarkan dengan nama lain. Selain itu, beberapa data sensitif seperti foto anak-anak asuh juga tidak akan ditampilkan dalam penelitian ini. Semua hal tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam menjaga kerahasiaan informasi dari informan yang tidak ingin disebutkan namanya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab membahas topik yang berbeda. Perbedaan pembahasan dalam setiap bab di penelitian ini tetap saling terkait satu sama lain, sehingga tersusun tulisan yang sistematis baik secara kronologis dan penulisan ilmiah. Hasil penelitian akan disajikan ke dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bagian ini dibahas latar belakang, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian.

Bab II adalah Kehidupan Masyarakat Desa JatiJajar Tahun 1977-2009. Bagian ini berisi gambaran umum mengenai kondisi kehidupan masyarakat di desa Jatiajar baik berupa informasi demografi dan etnografi desa. Pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai nilai sosial budaya serta kepercayaan masyarakat desa Jatijajar.

Bab III merupakan Perkembangan dan Struktur Sosial Lokalisasi Tegalrejo. Pada bagian ini dijelaskan mengenai perkembangan kegiatan prostitusi di Tegalrejo hingga terbentuk sebagai lokalisasi illegal. Fokus dalam menganalisis perkembangan pada penelitian ini pada periodisasi tahun 1977 hingga 2009. Pada bab ini juga akan menjelaskan struktur sosial yang ada pada masyarakat prostitusi yang tinggal di lokalisasi Tegalrejo.

Bab IV adalah Negosiasi Identitas Masyarakat Lokalisasi Tegalrejo. Bagian ini berisi interaksi antara dua kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Pada bab ini akan fokus untuk melihat bentuk-bentuk mediasi yang memungkinkan negosiasi identitas sehingga masyarakat yang bekerja di bidang prostitusi dapat diterima oleh penduduk asli.

Bab V adalah Kesimpulan. Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan dalam setiap bab yang telah dipaparkan sehingga dapat menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Diharapkan melalui kesimpulan diperoleh satu bentuk rangkaian yang relevan dari keseluruhan pembahasan.